



Ardiansyah MCS
Dosen Teknik Informatika
Universitas Ahmad Dahlan

JOKI skripsi sudah bukan barang baru bahkan tabu di dunia pendidikan tinggi tanah air. Sejak zaman baheula hingga sekarang, supply dan demand-nya terus terjaga. Hal ini menandakan bahwa bisnis joki skripsi ini sudah begitu mengakar kuat. Pertumbuhan Internet dan sosial media turut andil menjadi katalisator pertumbuhan gurita bisnis jasa joki ini. Di sisi lain, sudah tak terhitung artikel dan berbagai ulasan yang membahas tentang fenomena jasa gelap ini. Semua isinya kebanyakan mengecam, menyayangkan, namun nihil solusi konkrit. Di sisi lain, walau sebagian pelaku

Joki Skripsi: Pencegahan dan Cara Mengatasinya



sudah pernah ada yang diseret ke meja hijau, ancaman maupun sanksi sudah dikeluarkan, namun tidak lantas membuat praktik jasa ini mengcil. Bahkan ditengarai, semasa pandemi Covid-19 ini omset mereka malah makin meroket.

Sebagai seorang dosen, penulis kerap menemukan mahasiswa yang menggunakan joki skripsi. Gemes, marah, kecewa, sedih dan kasihan campur aduk menjadi satu. Pendidikan tinggi adalah penyelenggara proses pendidikan. Mahasiswa yang masuk dalam proses pendidikan adalah raw input yang akan diproses hingga menjadi insan yang berpengetahuan dan berketeterampilan. Oleh karena itu, penulis meyakini bahwa pasti ada salah satu bagian dalam proses pendidikan tinggi kita yang menyisakan celah sehingga menyebabkan praktik joki ini masih terus eksis dan tumbuh subur. Ya, karena joki skripsi merupakan dampak dari kebijakan atau proses Skripsi yang sudah diterapkan di hampir seluruh kampus di tanah air tercinta. Oleh karena itu pada tulisan ini penulis mengusulkan beberapa

cara pencegahan guna mengatasi praktik joki skripsi.

Pertama, hapus kebijakan Skripsi sebagai mata kuliah yang wajib diambil setiap mahasiswa.

Selama ini skripsi dikeluhkan oleh banyak mahasiswa S1 karena bebannya yang setara 6 SKS, namun effort yang dikeluarkan terasa sepanjang tahun dan menyiksa.

Mengapa demikian? Karena pada hakikatnya Skripsi bukanlah untuk setiap mahasiswa. Bila menilik sejarahnya, Skripsi sebenarnya warisan zaman Belanda untuk program setara magister, yang di negara asalnya sudah tidak diberlakukan lagi. Bahkan di negara-negara maju seperti AS, Inggris, dan Australia, Skripsi hanya untuk mahasiswa program honors dengan gelar “B.A (Hons), B.Eng (Hons)”, tidak untuk semua program Sarjana yang bergelar “B.A,

B.Eng” saja. Bahkan di AS, untuk mengambil program Hons harus memenuhi nilai IPK tertentu. Artinya, dari proses desain awal pun kita sudah membuat aturan yang tidak tepat yaitu mewajibkan Skripsi kepada semua mahasiswa. Hal inilah yang dikritisi oleh Profesor bidang matematika ITB yaitu Hendra Gunawan sebagai pemicu timbulnya fabrikasi Skripsi.

Kedua, perketat proses Skripsi. Bagi kampus yang masih memberlakukan atau menjadikan Skripsi sebagai pilihan, maka perlu memperketat proses pengerjaan Skripsi tersebut. Pengetatan ini agar bisa meminimalisir potensi terjadinya perjojian. Langkah utama yang dilakukan adalah mewajibkan mahasiswa untuk masuk ke laboratorium atau memberikan laporan kemajuan setiap hari. Hal ini akan membawa banyak manfaat yaitu pembimbingan ke mahasiswa akan semakin intens, sehingga pembimbing paham kemajuan yang dialami mahasiswa, masalah yang dihadapi dan lain sebagainya. Apalagi jika anggota dalam lab tersebut aktif dan saling bantu membantu,

maka sebenarnya masalah sebesar apa pun yang dialami mahasiswa akan bisa dipecahkan bersama dengan bantuan sesama anggota lab. Sebagai dosen pembimbing (Dospim) skripsi penulis mahfum, bahwa lemahnya pembimbingan dari Dospim, sedikit banyak juga turut berkontribusi atas maraknya mahasiswa mencari jalan keluar atas masalah skripsinya dengan menyewa jasa joki.

Ketiga, terapkan hukum sebagai efek jera. Di setiap laporan Skripsi sebenarnya sudah tertuang pernyataan yang ditulis mahasiswa bahwa Skripsinya bukan hasil dari plagiarisme, duplikat, atau dibuatkan pihak lain, sebagian atau keseluruhannya. Konsekuensinya pun tidak main-main, Skripsi dan gelar yang diperoleh bisa dicabut karena batal demi hukum.

Selain itu, jika menggunakan joki, berdasarkan keterangan dari Hukumonline, maka sebenarnya mahasiswa berpotensi melanggar pasal 378 KUHP yakni secara melawan hukum dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, dan menggerakkan

institusi tempatnya belajar untuk menyerahkan sesuatu kepadanya berupa gelar akademik. Namun, jika belum sampai tahap pemberian gelar, maka baru sampai tahap pemipuan. Jadi, dari aspek perangkat hukum sebenarnya sudah cukup lengkap, yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasi yang terus menerus, bisa berupa video edukasi, sosial media, pamflet, berita hukum para pelaku yang diseret ke meja hijau, hingga penegakan hukum tersebut secara tegas bagi yang benar-benar melanggar.

Harapannya mahasiswa semakin peduli dan ada shock therapy agar mahasiswa jangan pernah menggunakan joki. Mirip kiranya dengan kampanye antinarkoba selama ini.

Ada yang bilang bahwa hati dan nurani tidak pernah bohong. Begitu pula para (mantan) penyedia jasa Joki. Sebenarnya mereka sendiri mengakui bahwa apa yang mereka lakukan itu jahat, bertentangan dengan hati nurani, bahkan tidak sedikit yang mengakui pekerjaan mereka itu tidak berkah. (*)

RIBUAN KARYAWAN DIPULANGKAN

Gudang Genset Pabrik Wig Terbakar

WATES (KR) - Gudang genset pabrik wig milik PT Sun Chang Indonesia (SCI) di wilayah Tambak, Triharjo, Wates terbakar, Selasa (25/1) siang. Akibat kejadian ini ribuan karyawan yang sedang bekerja dievakuasi dan dipulangkan lebih awal. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Teknisi PT SCI, Purwono menerangkan, gudang yang terbakar di dalam-nya terdapat genset dan di sebelah kirinya terdapat bahan bakar solar. Api diketahui muncul jelang waktu istirahat karyawan atau sekitar pukul 11.30.

”Tidak terdengar adanya suara ledakan dari gudang yang terbakar. Saat itu ada beberapa karyawan yang berada di dalamnya, namun tidak ada yang mengalami luka-luka. Untuk penyebabnya kami belum mengetahui,” jelasnya.

Sementara Kapolsek

Wates, Kompol Gunardi Tejamurti mengatakan, pihaknya mendapat laporan kebakaran di pabrik wig milik PT SCI sekitar pukul 11.45. Petugas langsung menuju TKP dan menghubungi pemadam kebakaran (damkar).

Guna memadamkan api yang semakin membesar, melibatkan 2 mobil damkar Kulonprogo, PMI Kulonprogo, *water canon* Polres Kulonprogo serta bantuan damkar dari Sleman, Bantul dan Yogya. Sampai pukul 13.30 api belum bisa dipadamkan. Proses pemadaman api



KR-Dani Ardiyanto

Petugas berupaya memadamkan api yang melalap gudang genset pabrik wig PT SCI.

membutuhkan waktu yang lama karena di dalam ruangan banyak barang yang mudah terbakar.

”Anggota kami juga kita kerahkan untuk membantu evakuasi karyawan dan kendaraan milik karyawan. Sampai saat ini pe-

nyebab kebakaran belum bisa kita sampaikan karena masih dalam proses pemadaman api dan evakuasi. Setelahnya akan kita lakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran ini,” kata Kapolsek.

(R-2/Ras)

3 Program Unggulan Sektor Pertanian

WONOSARI (KR) - Bupati H Sunaryanta mengingatkan, kebijakan sektor pertanian pada tahun 2022 tetap harus mendukung tiga program unggulan pembangunan di Gunungkidul.

Dalam hal ini memperkuat ekonomi kerakyatan, pengembangan pariwisata dan mendorong berkembangnya investasi usaha segala bidang. Dalam hal ini banyak produksi pertanian yang dapat diolah menjadi makanan olahan dan berbagai jenis pertanian yang dapat berkembang menjadi agrowisata, seperti wisata buah klengkeng di Semanu.

Dibentuknya sentra-sentra makanan olahan untuk memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hasilnya akhirnya memperkuat ekonomi kerakyatan.

”Sektor pertanian tidak hanya mampu memperkuat



KR-Endar Widodo

Bupati Gunungkidul menyerahkan bantuan saprotan.

at ketahanan pangan, tetapi juga mengembangkan pariwisata dan juga merangsang investor di bidang pertanian,” kata Bupati Gunungkidul H Sunaryanta dalam arahan kebijakan pembangunan bidang pertanian, Senin (24/1).

Untuk mencapai tujuan tersebut petani mesti mendapatkan sarana produksi pertanian, tersedianya alat, benih dan jaringan irigasi yang memadai ser-

ta menjamin ketersediaan pupuk.

Masalah pupuk ini setiap tahun menjadi selalu menjadi perseoalan. Banyak petani kesulitan untuk mengakses bantuan pupuk, hal ini harus segera diatasi. Stok harus cukup, sistem distribusi mejamin pupuk dapat sampai ke petani yang membutuhkan, baik yang mempunyai kartu tani maupun yang tidak.

Sementara dalam lapo-

rannya Kepala Dinas Pertanian Gunungkidul Rismiyadi menjelaskan, cadangan beras saat ini mencapai 137,31 ton dengan harga Rp.10.800,- per kg.

Produksi tanaman padi 285.773 ton, jagung 245.709 ton, kedelai 5.678 ton dan kacang tanah 71.320 ton. Kemudian pengembangan kawasan buah durian di Patuk, kelengkeng di Semin dan alpukat di Ponjong, sedangkan kawasan hortikultura di Playen dan Wonosari. Pengembangan kakao dengan kebun entres di Tawarsari dan pengembangan florikultur bunga krisan di TTP Nglanggran serta bunga anggrek.

”Selain itu untuk memperkuat ketahanan dan keamanan pangan terus dikembangkan diversifikasi pangan, tidak bergantung pada beras,” tambahnya. (Ewi)

ANTISIPASI BENCANA DAN KETERSEDIAAN

Pemkab Akan Bangun 2 Lumbung Pangan

WONOSARI (KR) - Pemkab Gunungkidul akan membangun dua lokasi gudang pangan di daerah yang merupakan sentra penghasil padi di Kapanewon Semin. Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian dan Pangan Gunungkidul, HK Adinoto, menyatakan, untuk menunjang ketahanan pangan di masyarakat, produksi pangan yang besar harus dibarengi oleh ketersediaan gudang penyimpanan pangan yang memadai.

Adapun dua lokasi tersebut berada di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Dadi Makmur, Kalurahan Semin,” katanya Selasa (25/1).

Diakui Kabupaten Gunungkidul merupakan lumbung pangan di DIY. Ketahanan pangan menjadi sektor terpenting untuk diperhatikan saat ini. Mengingat pertanian meru-

pakan sektor yang tidak terganggu meskipun pandemi melanda dunia. Sarana dan pra sarana untuk menunjang tercapainya ketahanan pangan di masyarakat mulai diperhatikan Pemerintah Gunungkidul. Pihaknya kini sudah menentukan pembangunan lumbung pangan masyarakat di dua lokasi yakni untuk Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Dadi Makmur, Kalurahan Semin, Kapanewon Semin dan Gapoktan Sahabat di Kalurahan Umbulrejo, Kapanewon Ponjong.

”Penetapan lokasi pembangunan lumbung pangan masyarakat berdasarkan usulan tahun 2021,

Pembangunan lumbung pangan masyarakat bertujuan untuk mengantisipasi ketersediaan pangan ketika terjadi bencana alam atau terjadinya gagal panen di suatu

wilayah.

Selain itu juga sebagai wadah pembelajaran petani di dalam pengelolaan lumbung agar dapat memberikan manfaat dan keuntungan serta kesejahteraan petani. Pembangunan lumbung pangan masyarakat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Pertanian.

Adapun setiap gudang lumbung pangan akan dibangun dengan kapasitas 100 ton gabah, dilengkapi dengan rumah Rice Milling Unit (RMU) dan Bedreyer dan disertai dengan lantai jemur seluas 100 meter persegi. Untuk pengadaan RMU dan Bedreyer nanti melalui mekanisme pengadaan barang.

”Seperti Perpres, dilakukan secara swakelo oleh Gapoktan yang didampingi fasilitator,” terangnya.

(Bmp)

Dispar Diminta Akses Danais untuk Infrastruktur Obwis

PENGASIH (KR) -

Dinas Pariwisata Kulonprogo didorong Komisi IV DPRD Kabupaten Kulonprogo mengakses dana keistimewaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur menuju objek wisata di kawasan Bukit Menoreh, khusus di Kapanewon Kokap.

”Beberapa tahun terakhir, di Kapanewon Kokap berkembang pesat objek wisata yang dikembangkan oleh masyarakat, seperti Pulepayung, Kali-

biru hingga Canting Mas.

Tetapi perkembangan objek wisata tersebut tidak dibarengi dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang mendukung,” ujar Tito Kurniawan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kulonprogo, Senin (24/1).

Sektor pariwisata yang dikelola oleh masyarakat ini, lanjut Tito, pada dasarnya mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di sekitar objek wisata dan pelaku wisata sendiri.

Namun, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, kegiatan wisata lumpuh total, sehingga perlu adanya dukungan dari Dispar.

”Kami berharap Dispar Kulonprogo melakukan banyak kegiatan Sambang Kulonprogo atau Sambanggo padat karya untuk pemberdayaan masyarakat dan pelaku wisata. Sehingga membantu mereka bertahan sampai sektor pariwisata pulih kembali,” ucapnya. (Wid)

KEJARI KULONPROGO

Komitmen Wujudkan WBK dan WBBM

WATES (KR) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Kulonprogo mempunyai komitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada tahun 2022 serta mencegah terjadinya suap.

Kepala Kejari Kulonprogo, Kristanti Yuni Purnawanti SH MH mengatakan, ada enam aspek yang harus dilakukan guna mewujudkan WBK dan WBBM, yakni manajemen perubahan, kekuatan peatalaksanaan, penguatan manajemen sumber daya manusia (SDM), peningkatan akuntabilitas, kinerja pengawasan dan pelayanan publik.

”Sebagai upaya untuk mewujudkan WBK mau-

pun WBBM, Kejari Kulonprogo bakal melakukan sejumlah hal. Di antaranya menempatkan personel sesuai dengan ketugasannya berdasarkan keahliannya melalui surat keputusan,” katanya, Senin (24/1).

Pihaknya rencana akan mengirimkan beberapa pegawai untuk mengikuti pelatihan penyidikan baik seminar maupun workshop yang dilakukan oleh instansi lain.

Untuk pengawasan, Kejari Kulonprogo menerapkan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan *whistle blowing system* atau pengaduan masyarakat.

”Jika semua pelayanan dilakukan secara profesional, tidak ada Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (KKN) di dalamnya serta suap menyuap. Apabila pegawainya didapatkan terlibat akan diproses sesuai aturan yang berlaku. Bahkan, ancamannya bisa pemberhentian jabatan maupun pidana,” jelasnya.

Agen Perubahan Kejari Kulonprogo, Awan Prasetyo Luhur SH menambahkan, untuk mewujudkan WBK dan WBBM, agen perubahan bertugas menjadi *role model* atau percontohan bagi pegawai Kejari lainnya, baik tutur kata, penerapan tugas dan kewenangannya. Sedangkan duta pelayanan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan stakeholder di Kejari Kulonprogo. (R-2)

TINGKATKAN LAYANAN, WUJUDKAN WBKWBBM

UPT Pemasyarakatan Deklarasi Janji Kinerja

WONOSARI (KR) - Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) DIY Budi Argap Situngkir MH mengungkapkan, pelayanan pemasyarakatan harus terus ditingkatkan.

Untuk mendukung terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM). Meskipun situasi sekarang masih pandemi, tidak boleh menghalangi peningkatan layanan.

”Inovasi pelayanan perlu terus ditingkatkan, termasuk pembenahan. Untuk meningkatkan layanan dan kinerja,” kata Budi Argap Situngkir MH di acara Deklarasi Janji Kinerja UPT Pemasyarakatan se Wonosari di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Wonosari, Selasa (25/1).

Kegiatan dihadiri Kepala Ombudsman RI Perwakilan DIY Budhi Masdhuri, Kepala Lapas Kelas II B Wonosari Marjiyanto,



KR-Dedy EW

Penandatanganan deklarasi janji kinerja di Lapas Wonosari.

Kepala Lapas Perempuan Kelas II B Yogyakarta, Ade Agustina Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Yogyakarta Teguh Suroso, Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari Nugroho dan Kepala Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Kelas II Wonosari Ruh Harijadi, perwakilan Polres, PN Wonosari, Kodim, Kejaksaan dan undangan.

Kepala Ombudsman DIY Budhi Matshuri menambahkan, deklarasi ini

sebagai bentuk penguatan dalam peningkatan kinerja.

Sehingga jajaran UPT Pemasyarakatan mencapai WBK dan WBBM. Namun demikian WBK WBBM merupakan sarana memberikan pelayanan terbaik.

”Sehingga ada atau tidak penilaian WBK - WBBM, harus terus didorong untuk peningkatan layanan. Harapannya mampu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat,” jelasnya. (Ded)